



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/UND-519/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN

Jakarta, 29 Agustus 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Undangan Kegiatan Workshop
Pengisian Data IBM Tahun 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**

2. Kepala BNN Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/333/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Petugas Pendamping Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2024;
- h. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Sprin/2003/VI/KA/KP.05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputy Rehabilitasi BNN;
- i. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputy Bidang Rehabilitasi BNN akan menyelenggarakan Workshop Pengisian Data IBM Tahun 2024 secara virtual pada:

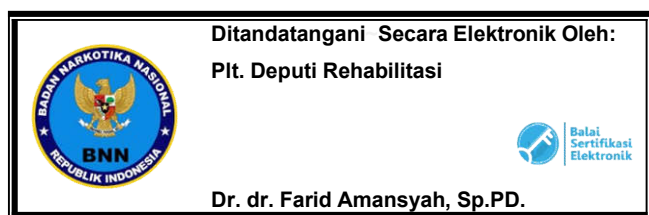
/tanggal

tanggal : 17 Oktober 2024
waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
alamat virtual : akan diinformasikan lebih lanjut
agenda :

No.	Agenda	Keterangan
1	Mekanisme pengisian data Indeks Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (INSANI) Tahun 2024	Membimbing petugas pendamping IBM dalam penyebaran dan pengisian kuesioner indeks kepada responden yang terdiri dari petugas pendamping IBM, Agen Pemulihan, dan klien IBM. Skor INSANI menunjukkan tingkat efektivitas program IBM yang diselenggarakan oleh satker pada tahun 2024.
2	Mekanisme pendataan keberlanjutan unit IBM yang dibentuk tahun 2021-2023	Membimbing petugas pendamping IBM dalam mendata unit IBM yang telah dibentuk pada tahun 2021-2023, untuk mengetahui keberlanjutan unit IBM serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- Berkaitan dengan butir dua, mohon Kepala menugaskan petugas pendamping IBM masing-masing satuan kerja untuk hadir sebagai Peserta dalam kegiatan dimaksud. Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia a.n Herni Eka Setyakapti (0813.1050.9585).
- Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN

PEMBAGIAN PESERTA WORKSHOP PENGISIAN DATA IBM TAHUN 2024
TANGGAL 17 OKTOBER 2024

Tim	PROVINSI	JUMLAH SATUAN KERJA	TOTAL SATUAN KERJA
1	1. Lampung	6	51
	2. Kep. Bangka Belitung	5	
	3. Banten	4	
	4. Sulawesi Utara	5	
	5. Sulawesi Tengah	7	
	6. Sulawesi barat	2	
	7. Papua	3	
	8. Bengkulu	3	
	9. Sumatera Utara	16	
2	1. Aceh	11	52
	2. Riau	5	
	3. Kalimantan Selatan	9	
	4. Sulawesi Tenggara	5	
	5. Jawa Tengah	10	
	6. Kepulauan Riau	4	
	7. DKI Jakarta	4	
	8. Sulawesi Selatan	4	
3	1. Maluku	3	51
	2. Kalimantan Tengah	3	
	3. D.I. Yogyakarta	4	
	4. Jawa Timur	18	
	5. Kalimantan Barat	8	
	6. Kalimantan Utara	3	
	7. Bali	7	
	8. NTB	5	

/Tim..

Tim	PROVINSI	JUMLAH SATUAN KERJA	TOTAL SATUAN KERJA
4	1. Sumatera Barat	5	53
	2. Sumatera Selatan	10	
	3. Jawa Barat	15	
	4. Kalimantan Timur	4	
	5. Jambi	4	
	6. Maluku Utara	4	
	7. NTT	4	
	8. Gorontalo	6	
	9. Papua Barat	1	

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

